

JURNAL HARMONI

ISSN:1412-663X, e-ISSN:2502-8472

**RELASI ANTAR UMAT MAYORITAS DAN MINORITAS:
STUDI MASYARAKAT TIONGHOA DI SURABAYA**

**RELATIONS BETWEEN MAJORITY AND MINORITY PEOPLE:
STUDY OF CHINESE COMMUNITY IN SURABAYA**

Wasisto Raharjo Jati

Pusat Penelitian Politik, LIPI Jakarta, Indonesia
wasisto.raharjo.jati@lipi.go.id

Artikel diterima 16 Agustus 2021, diseleksi 5 Desember 2021, dan disetujui 27 Desember 2021
DOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.499>

Abstract

This study aims to analyse the relationship problem between majoritarian and minorities within Indonesian society. More specifically, relationship between Chinese-Indonesians, which are minorities and majoritarian in both religion and ethnicity. By using mixed method such as case study that conducted only in Surabaya. Archival research, and also focused group discussion that done in less than a year, this study reveals some interesting findings. The first finding shows both linguistic and social integration between Chinese-Indonesians and majoritarian causing social acceptance to the minorities. This particularly refers to the use of "Bahasa Jawa" (Javanese language) is the key to integrate Chinese – Indonesians and majoritarian in Surabaya. This first finding also shows the fluid relationship between minorities and majoritarian albeit both parties still to defend their hereditary identities. The theoretical framework itself is state politics to frame state's attitude in regulating society. Conclusion of the study is the long existence of Chinese-Indonesians as one of minorities enable them to get wide social acceptance from majoritarian society. This condition subsequently affects state politics to be more accommodative when it comes to regulate minorities and majorities.

Keywords: Majoritarian, Minorities, Surabaya, Chinese-Indonesians

Abstrak

Studi ini hendak menjelaskan mengenai masalah relasi umat mayoritas dan minoritas dalam masyarakat Indonesia. Terkhususnya adalah relasi masyarakat etnis Tionghoa yang selama ini dianggap sebagai minoritas dengan relasi masyarakat mayoritas baik secara agama maupun etnisitas. Dengan menggunakan metode penelitian campuran baik itu secara studi kasus di satu lokasi yakni Surabaya. Studi arsip, dan juga diskusi kelompok terfokus yang dilakukan kurang lebih setahun, studi ini menemukan beberapa temuan menarik. Adapun temuan yang pertama: adanya integrasi secara linguistik maupun sosial antara etnis Tionghoa dengan umat etnis dan agama mayoritas di Surabaya. Bahasa Jawa menjadi kunci integrasi antara etnis Tionghoa dengan umat mayoritas. Temuan pertama ini juga menunjukkan adanya relasi yang cair antara minoritas maupun mayoritas dengan berupaya masih mempertahankan identitas aslinya.. Analisis teori yang digunakan dalam studi ini adalah politik negara untuk meringkai perubahan perilaku negara dalam meregulasi masyarakat. Kesimpulan dari studi ini adalah eksistensi panjang Tionghoa sebagai salah satu etnis minoritas tersebut telah memungkinkan penerimaan sosial dari masyarakat mayoritas menjadi lebih terbuka. Kondisi itulah yang kemudian mempengaruhi politik negara

PENDAHULUAN

Relasi mayoritas dan minoritas merupakan persoalan yang dinamis dalam sebuah negara multikultur. Hal tersebut bisa mengandung beberapa makna, yakni integrasi minoritas dalam tubuh mayoritas, relasi setara antara mayoritas dan minoritas, maupun disintegrasi antara mayoritas dengan minoritas. Adanya ketiga relasi dinamis itulah yang akan menjadi titik pembahasan posisi masyarakat etnis Tionghoa dalam relasi sosial dengan masyarakat di sekitarnya.

Persoalan mengenai relasi mayoritas dan minoritas ini merupakan masalah yang selama ini menjadi hal krusial di Indonesia. Hal tersebut terkait dengan adanya masalah ego identitas yang selama ini mengemuka dalam relasi sosial di ruang publik. Bagi kelompok identitas mayoritas baik itu secara identitas etnik maupun agama acap kali bertindak sebagai perwakilan utama yang seolah sudah mewakili satu kelompok masyarakat. Padahal dalam sistem sosial masyarakat itu juga terdapat berbagai macam kelompok minoritas yang seringkali menjadi kelompok marjinal. Kondisi tersebut yang kemudian menjadikan suara kelompok minoritas seringkali tidak terdengar dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai kasus, terdapat semacam perlakuan sebagai warga negara kedua (*secondary citizen*) yang disematkan kepada kelompok etnis maupun agama tertentu. Hal tersebut mengacu pada hasil riset yang dikemukakan oleh Melly G Tan bahwa perlakuan warga negara kelas dua bersumber pada dilema yang dihadapi oleh warga Tionghoa antara

kemudian juga akomodatif dalam mengatur relasi minoritas dengan mayoritas.

Kata Kunci: Mayoritas, Minoritas, Surabaya, Tionghoa

mengakui “keindonesiaan” sebagai jalan kesetaraan atau “ketionghoan” sebagai jalan eksistensi (Tan, 2008).

Adapun perlakuan sebagai warga negara kedua ini banyak dialami oleh kelompok masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Meskipun perlakuan tersebut secara administratif sudah dihapuskan dalam level regulasi nasional, secara sosial dan psikologis, acap kali muncul sentimen yang dialamatkan kepada etnis Tionghoa tersebut. Sebuah studi relevan yang dilakukan oleh Effendi dan Prasetyadji memperlihatkan mengenai persoalan kewarganegaraan dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya berpihak bagi etnis Tionghoa (Effendi dan Prasetyadji, 2008). Masih adanya eksklusifitas maupun juga minimnya penghargaan terhadap eksistensi minoritas menjadikan masyarakat Tionghoa Indonesia sendiri terlabelisasi sebagai minoritas ganda (*double minority*). Pengertian tersebut meliputi yakni secara agama maupun populasi, masyarakat Tionghoa ini termasuk kelompok masyarakat yang populasinya tidak seberapa dibandingkan dengan kelompok etnis utama misalnya Jawa atau Sunda. Kedua pengalaman inilah yang akan dilihat sebagai analisa mendasar tentang relasi mayoritas dan minoritas dengan fokus pada masyarakat Tionghoa Surabaya. Pemilihan kasus masyarakat Tionghoa Surabaya dikarenakan etnis ini tidak lagi dipandang sebagai pendatang, namun warga lokal karena proses akulturasi yang bagus.

Rumusan masalah yang hendak ditanyakan dalam riset ini adalah bagaimana relasi masyarakat Tionghoa

sebagai kelompok etnis minoritas dengan masyarakat identitas mayoritas dalam relasi sosial keseharian? Pertanyaan ini menjadi relevan dan penting mengingat masyarakat Tionghoa sebagai kelompok etnis minoritas sudah eksis sejak begitu lama di Surabaya. Kondisi tersebut yang membuat dinamika sosial antara minoritas dan mayoritas menjadi menarik untuk dikaji. Adanya sisi dinamis itulah yang mempengaruhi mengenai politik negara dalam meregulasi hubungan kemasyarakatan. Dalam riset ini, topik alternatif yang dibahas adalah politik negara (*state politics*) terhadap etnis Tionghoa di Kota Surabaya paska Orde Baru.

Surabaya dipilih menjadi lokasi untuk melihat politik negara yang dikembangkan dalam konteks otonomi daerah merespons masalah etnisitas sebagai suatu permasalahan yang perlu ditangani di aras lokal. Selain konteks otonomi daerah, secara historis maupun demografi, orang Tionghoa di Kota Surabaya telah eksis lewat peran-peran sosial, ekonomi dan politik semenjak era pra-kolonialisme hingga sekarang. Hal itu dibuktikan dengan berbagai macam peninggalan sosio-kultural orang Tionghoa yang tersebar di kota ini dan juga berbagai penjurur Provinsi Jawa Timur seiring dengan migrasi leluhur mereka dari Tiongkok. Peran yang beragam ini penting untuk dipahami sebagai pijakan penting ketika melihat ragam ekspresi kelompok etnis Tionghoa yang terpetakan melalui jaringannya masing-masing di Kota Surabaya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini lebih mengedepankan penggalian data primer maupun sekunder untuk mendapatkan narasi komprehensif. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan terdiri dari

berbagai macam yakni studi kasus (*case study*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), maupun juga studi arsip (*archival research*). Secara keseluruhan metode ini dijalankan oleh satu tim dalam rentang waktu setahun di tahun 2017.

Studi kasus pertama dilakukan di Surabaya pada pertengahan bulan April 2017 dengan menarget beberapa tokoh informal Tionghoa yang berkenan menjadi narasumber kunci, para akademisi, maupun juga para aktivis LSM yang peduli dengan relasi multikultural. Pemetaan berbagai tokoh inilah yang kemudian dibawa nantinya dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Selain itu pula, riset arsip (*archival research*) ini ditujukan untuk mengkaji berbagai macam literatur relevan guna melihat eksistensi Tionghoa sebagai umat minoritas dalam sistem sosial masyarakat Surabaya.

Penelitian di Jakarta sendiri kurang lebih lebih banyak berfokus pada penggalian data melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) yang dilangsungkan dalam berbagai seri. Hal ini ditujukan untuk mencari kedalaman informasi tentang Tionghoa itu sendiri dari kacamata para tokoh masyarakat Tionghoa, para akademisi, maupun aktivis. Tentunya data yang diperoleh dari level pusat dan daerah ini setidaknya bisa menggambarkan secara lebih rinci mengenai eksistensi dan relasi minoritas dengan mayoritas.

Metode analisis dalam studi ini lebih mengedepankan analisa kritis yakni berusaha menggali secara informatif berbagai macam temuan yang didapat dari berbagai literatur relevan dan terkait. Setelah menemukan temuan-temuan yang dinilai relevan dan mampu dikembangkan menjadi satu narasi utuh, maka disusunlah berbagai macam temuan tersebut dalam satu tulisan utuh.

PEMBAHASAN

Politik Negara dan Eksistensi Masyarakat Tionghoa

Relasi antara politik negara dengan eksistensi Tionghoa sebenarnya menunjukkan adanya hubungan yang pasang surut. Hal tersebut dimulai dengan stigmatisasi pribumi dan pendatang maupun juga muslim dan non-muslim. Kedua istilah tersebut sebenarnya merupakan bentuk ekspresi akar rumput yang diteruskan kepada level pembuatan kebijakan publik. Secara lebih khusus, kedua hal itu yang menjadikan relasi negara dengan Tionghoa sebagai minoritas tergantung dari seberapa penting kontribusi Tionghoa bagi perekonomian. Hal itulah yang sekiranya menjadi kunci penting dalam melihat eksistensi lama Tionghoa sebagai kaum minoritas di Surabaya.

Tionghoa telah menjadi bagian penting dalam masyarakat Surabaya sejak era kerajaan pra kolonialisme, kolonialisme, pergerakan kemerdekaan, hingga masa kini. Dalam rentang waktu tersebut, etnis Tionghoa yang semula adalah pendatang secara perlahan bertransformasi menjadi penduduk kota. Transformasi tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai macam konflik hingga kemudian etnis Tionghoa mampu beradaptasi dengan baik. Adapun pengertian transformasi sendiri dimaksudkan adalah upaya perubahan dan penerimaan sikap warga etnis Tionghoa dengan warga non Tionghoa maupun sebaliknya. Adanya transformasi tersebut dipengaruhi oleh adanya pengeluaran Keppres No. 6/2000 yang memberikan ruang ekspresi budaya maupun bahasa bagi etnis Tionghoa.

Hal itu kemudian diikuti dengan pengakuan Hari Imlek sebagai Hari Libur Nasional pada tahun 2003 hingga yang terakhir adalah Keppres No. 12/2014 yang mengatur mengenai

perubahan istilah China menjadi Tionghoa. Dalam pemerintahan paska Orde Baru, etnis Tionghoa dan ekspresi budayanya mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah. Dimulai sejak era Pemerintahan Gus Dur dengan PP. No. 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 yang melarang ekspresi budaya Tionghoa. Pemerintahan Megawati kemudian menindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 19/2002 yang memutuskan Imlek sebagai Hari Libur Nasional. Sedangkan Pemerintahan SBY dengan Keppres No. 12/2014 yang mengatur mengenai perubahan China menjadi Tionghoa. Berbagai macam perubahan yang terjadi di level politik pusat tersebut belum tentu berimplikasi signifikan terhadap perubahan di level bawah. Dalam peraturan daerah yang berlaku paska UU otonomi daerah No. 22/ 1999 serta diperharui menjadi UU No. 32/2004 pada umumnya sektor-sektor pembangunan yang "basah" lazim dikuasai "rezim putra daerah" yang lebih mengutamakan kepentingan "orang asli" (Tirtosudarmo, 2007). Temuan stereotip tersebut mengindikasikan bahwa Tionghoa masih mengalami pergulatan identitas yang cukup signifikan. Meskipun demikian level diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa Surabaya tidaklah sekecang dengan apa yang dialami oleh etnis Tionghoa di berbagai tempat lainnya. Dalam kasus Sambas, etnis Tionghoa mengalami persaingan sosial dan politik dengan etnis Melayu maupun Dayak dalam upaya memperebutkan posisi sebagai putra daerah (Tanasaldy, 2007).

Perubahan perilaku politik negara seperti yang digambarkan pada perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya penerimaan negara dan masyarakat kepada etnis Tionghoa. Makna penerimaan dalam konteks ini tentunya dikaitkan Secara umum, penerimaan masyarakat awam melihat etnis Tionghoa masih dilihat sebagai

“orang luar” ketimbang sebagai orang Indonesia. Hal tersebut bisa dipahami sebagai sikap yang diwarisi pemikiran Orde Baru yang mengedepankan adanya pokok-pokok rasialisme dalam politik yang kemudian melakukan diferensiasi politik. Rasialisme yang semula lebih pada prasangka sosial yang kemudian “diakomodasi” dalam politik negara (Effendi dan Prasetyadji, 2008).

Narasi penting yang perlu dicatat dalam membahas etnis Tionghoa Surabaya adalah semangat kolektivitas komunal dan adaptasi kultural. Kedua hal itu yang membuat narasi etnis Tionghoa memiliki perbedaan dengan konteks narasi dalam eksistensi komunitas Tionghoa lainnya seperti di Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Singkawang, maupun Makassar. Satu hal penting untuk dilihat dalam membahas eksistensi Tionghoa lebih tergantung pada pola komunikasi lintas kultural maupun kondisi sosio-demografi yang melatarbelakanginya. Terlebih lagi dimensi kontestasi dan pertarungan identitas menjadi kunci dalam membaca konteks masyarakat yang plural. Dalam kasus Medan dan Jakarta, umumnya lebih komunitas Tionghoa dipandang lebih eksklusif, berbasis teritorial maupun sub etnis. Sedangkan dalam kasus Yogyakarta dan Solo, komunitas Tionghoa mengalami politik *Pecinan* yang membuat mereka kemudian terkotakkan baik secara warga negara maupun etnis. Singkawang sendiri memiliki kemiripan dengan Surabaya, merupakan konsentrasi warga Tionghoa terbesar di Indonesia.

Pembangunan Kolektivitas Komunal bagi Etnis Tionghoa di Surabaya

Berbagai macam studi telah memberikan berbagai sudut pandang dalam merangkai narasi Tionghoa sebagai salah satu umat minoritas. Narasi tersebut pada dasarnya lebih

pada kontribusi sosial ekonomi Tionghoa dalam membangun perekonomian Kota Surabaya. Meskipun terdapat temuan studi yang pernah mengungkap aksi heroisme kalangan Tionghoa dalam pergerakan kemerdekaan. Mayoritas lebih berfokus pada narasi sosial ekonomi maupun narasis sosial budaya. Studi mengenai kelompok etnis Tionghoa di Surabaya menjadi penting untuk dibicarakan karena kota Pahlawan menjadi pusat pergerakan orang-orang Tionghoa yang mempengaruhi dinamika sejarah Indonesia (Devi, 2010). Hal lain yang secara signifikan perlu dicatat dalam membahas Tionghoa di Surabaya adalah posisi yang diambil oleh etnis Tionghoa untuk bisa beradaptasi dan membangun kohesi dalam masyarakat yang majemuk.

Pergerakan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa tersebut meliputi mobilitas sosial, transisi ekonomi, maupun pergerakan politik. Sejarah masuknya kelompok etnis Tionghoa di Kota Surabaya dapat dilihat hingga pertengahan abad ke 17 termasuk di dalamnya Tionghoa, dan gelombang kedua dimulai dari pertengahan abad ke 17 hingga dekade ketiga abad 20 (Devi, 2010). Adapun era kolonialisme Belanda menjadi titik penting terjadinya diskriminasi rasial bagi etnis Tionghoa di Kota Surabaya yang dimulai antara tahun 1910-1946. Dalam rentang waktu tersebut, berlaku mobilitas sosial bagi penduduk Kota Surabaya yang dikenal sebagai 1) *opplossing* (peleburan) dan 2) *equalization* (penyamaan). Dalam istilah pertama, *equalization* lebih diidentikkan dengan identitas Barat dan Kristen, dan istilah kedua, *opplossing* lebih diidentikkan dengan Islam dan “pribumi” (Noordjanah, 2010).

Kelompok Tionghoa pun terjepit dalam model mobilitas tersebut sehingga kemudian menciptakan polarisasi di kalangan etnis Tionghoa. Bagi kalangan totok sendiri lebih berupaya

mempertahankan identitas aslinya dengan mempertahankan tradisi leluhur maupun bahasa mandarinnnya. Sementara kalangan peranakan mengalami dilema cukup signifikan yakni keinginan mereka tetap mempertahankan identitas Tionghoa namun tidak mau dianggap setara dengan “pribumi”. Kedua bentuk kebijakan kolonial itu menunjukkan adanya ambiguitas dari pemerintah kolonial saat itu dalam mendefinisikan Tionghoa tersebut. Letak ambiguitas tersebut terutama terletak pada sisi apakah Tionghoa ini layak menjadi warga kelas utama atau dikelompokkan dalam kelompok pribumi.

Pada rentang tahun tersebut, politik negara kolonial memberlakukan ras dan etnis sebagai dasar labelisasi individu dan kelompok melalui dua kebijakan yakni *wijkenstelsel* yakni pembentukan konsentrasi penempatan lokasi penduduk pada area tertentu; dan *passenstelsel* yakni adanya kartu pass lewat bagi etnis Tionghoa apabila keluar dari area konsentrasinya menuju tempat lainnya (Noordjanah, 2010). Mayoritas etnis Tionghoa Surabaya sendiri berasal dari kawasan Tiongkok Selatan yang bermigrasi ke Jawa. Berkembangnya etnis Tionghoa di Indonesia ini tidak terlepas dari konteks harapan yang ditawarkan. Terlebih lagi kawasan pesisiran Jawa sendiri merupakan kawasan percampuran budaya dan terbebas dari pengaruh kekuasaan yang itu membuat etnis Tionghoa tertarik untuk berdagang dan menetap.

Etnis Tionghoa Surabaya terbentuk karena ikatan komunitas yang kuat berbasis kekeluargaan. Ikatan komunitas tersebut dibina dengan garis keturunan yang berada di Tiongkok, namun dalam konteks generasi sekarang ini, ikatan tersebut mulai memudar. Generasi Tionghoa Surabaya yang kini tinggal dan berkembang adalah Tionghoa generasi ketiga dan keempat. Generasi

ini mewakili perbedaan cukup signifikan dengan generasi pendahulunya. Sebagai contoh, generasi ketiga dan keempat lebih banyak fokus pada pengembangan diri lewat pendidikan maupun kreativitas diri. Meskipun mengurus bisnis masih menjadi pilihan utama, namun seperti halnya orang tua mereka lebih demokratis untuk masa depan anak-anaknya. Selain itu pula, bilamana pada generasi sebelumnya lebih menekankan kepada pengetahuan tradisi budaya, sekarang ini pada generasi terbaru lebih condong pada akulturasi dengan modernitas. Anak muda Tionghoa Surabaya hari ini tidaklah mengalami kondisi inferioritas dan juga diskriminasi budaya seperti halnya generasi sebelumnya. Hanya saja kemudian yang menarik dari etnis Tionghoa Surabaya muda ini adalah ada kecenderungan ingin melepaskan identitas ke-Tionghoa-an-nya.

Adanya keinginan untuk melepaskan identitas Tionghoa ini menunjukkan kalau sebenarnya makna minoritas maupun mayoritas sebenarnya sudah mengikis di Surabaya. Hal ini dikarenakan karena adanya Bahasa Jawa sebagai bahasa pemersatu antar semua kalangan di Surabaya. Hal itulah yang menjadikan relasi antar generasi berikutnya menjadi lebih cair dan dinamis ketimbang generasi sebelumnya. Kondisi inilah yang menjadikan secara sosial Tionghoa sebagai kaum minoritas diterima secara meluas di Surabaya, meskipun secara politik negara terkesan masih menunggu kondisi yang memungkinkan.

Sejak era kolonialisme, orang Tionghoa Surabaya senantiasa menjadi korban atas kebijakan “cuci bersih” yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain sebenarnya, etnis Tionghoa selama ini menjadi korban negara yang mengatasnamakan politik negara. Hubungan etnisitas yang tidak seimbang tersebut sebenarnya dibutuhkan negara

untuk melegitimasi diri sebagai entitas nasional yang meemastikan kepentingan warga negara secara definitif. Adanya penekanan sebagai “nasional” itulah yang kemudian meminggirkan entitas etnis Tionghoa yang dianggap sebagai aktor ekstra nasional.

Oleh karena itulah sebenarnya negara berperan besar terhadap pola diskriminasi yang menubuh dalam regulasi maupun narasi pikiran warga negara selama ini. Pola itulah yang kemudian secara tidak langsung berdampak pada perilaku dan ekspresi sikap etnis Tionghoa selama ini yang terkonstruksi menjadi inferior. Selanjutnya situasi ini pun memengaruhi bertumbuhnya sentimen ras dan agama baik di antara etnis Tionghoa, maupun antara etnis Tionghoa dengan non Tionghoa. Adanya kebijakan lokalisasi sendiri yang kini berdampak dalam kasus Surabaya mengindikasikan sebenarnya masih terjadinya kesenjangan sosial antara etnis Tionghoa dan non Tionghoa. Di bawah kekuasaan kolonial, Tionghoa diposisikan sebagai mereka yang berpendidikan dan trampil, sedangkan kelompok etnis Eropa menjadi golongan birokrat, dan masyarakat lokal/setempat yang digolongkan seagai “pribumi” menjadi tenaga buruh (Basundoro, 2013). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa posisi etnis Tionghoa sendiri adalah pionir kelas menengah dalam sejarah kolonialisme Indonesia. Kelas menengah Tionghoa Surabaya inilah yang menjadi pionir utama penggerak ekonomi Indonesia terutama Surabaya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, adanya dua kebijakan tersebut sebenarnya mirip dengan kebijakan *ghettonization* bagi etnis Yahudi di era Nazi Jerman yang bertujuan untuk melakukan eliminasi etnis dan rasial secara bertahap. *Ghetto* sendiri lebih merujuk pada kamp kerja paksa bagi tahanan. Sedangkan yang terjadi pada etnis Tionghoa di Surabaya

bukanlah mengarah pada genosida, namun kepada upaya pembelahan masyarakat yang berdampak pada sikap curiga-mencurigai dan musuh-memusuhi satu sama lainnya secara bawah sadar. Implikasinya kemudian adalah muncul efek trauma psikis bagi etnis Tionghoa yang membekas cukup dalam dari generasi ke generasi hingga hari ini. Oleh karena itulah, bagi etnis Tionghoa Surabaya dihadapkan pada dua pilihan sulit yakni 1) menanggalkan identitas Tionghoanya dengan menjadi Jawa agar diterima masyarakat luas; dan 2) tetap menjadi Tionghoa dengan berada dalam jaringan masing-masing karena merasa tidak aman dengan masyarakat sekitar.

Hal menarik ketika membahas mengenai etnis Tionghoa di Kota Surabaya adalah cara mereka membangun kohesivitas sosial dengan etnis besar lainnya seperti Jawa dan Madura dalam relasi ekonomi-politik. Terkhusus tentang Pemilu Gubernur DKI 2017 telah berdampak signifikan terhadap persepsi yang berkembang di kalangan etnis Tionghoa di Surabaya. Sebelum kasus penistaan itu muncul, mayoritas etnis Tionghoa berada dalam posisi “aman” ketika menampilkan sebagai politisi maupun aktivitas. Namun pengadilan dan proses penahanan Ahok telah mengubah secara signifikan terhadap persepsi dan juga praktik kebebasan berekspresi Tionghoa di bidang politik di Surabaya. Sekarang, ada kecenderungan etnis Tionghoa Surabaya kembali menjadi apolitis karena takut dengan adanya intimidasi politik. Kasus naiknya sentimen rasial dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tersebut berdampak meluas pada bertumbuhnya sikap rasial yang ditujukan pada etnis Tionghoa Surabaya. Sentimen rasial tersebut mengacu pada identifikasi Tionghoa Surabaya yang dianggap sebagai “orang luar” dan “non muslim”. Adanya persepsi dari etnis Tionghoa bahwa bisa muncul pengulangan sejarah

kelam 1998 pada mereka menunjukkan masih ada trauma yang dirasakan.

Jika ditelaah dari data-data yang ada, komunitas etnis Tionghoa Surabaya memang berkembang secara bertahap dalam proses yang lama. Kini sudah mencapai generasi 4 semenjak pertama kali datang ke Nusantara. Berdasarkan sensus penduduk 2010 Kota Surabaya mencapai 2.765.908 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 8304 jiwa per km. Adapun komposisi populasi penduduk kota sendiri terbagi atas suku Jawa (83,68 persen), Madura (7,5 persen), Tionghoa (7,25 persen), dan Arab (7,25 persen) per 2010 (BPS, 2010). Dengan kata lain, etnis Tionghoa di Surabaya menempati posisi terbesar ketiga di Kota Surabaya yang persebaran demografinya terutama terkonsentrasi di Surabaya Utara dan Surabaya Timur yang notabene adalah kawasan perdagangan.

Prosentase etnis Tionghoa di Surabaya merupakan bagian dari populasi etnis Tionghoa yang bermukim di Provinsi Jawa Timur sebanyak 244.393 ribu jiwa yang kemudian menempatkan provinsi ini dalam ke posisi kelima dalam prosentase etnis Tionghoa di Indonesia (BPS, 2010). Secara nasional, jumlah populasi etnis Tionghoa di Indonesia mencapai 2. 832. 510 jiwa atau setara dengan 1,2 persen dari 265 juta penduduk Indonesia, di mana 93,31 persen bermukim di perkotaan dan hanya 6,69 persen bermukim di pedesaan. Terkonsentrasinya penduduk Tionghoa yang berada di perkotaan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari politik negara di rezim-rezim sebelumnya yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai etnis apolitis dan *homo economicus*. Penekanan pada konteks apolitis tersebut dikaitkan dengan konstruksi *phobia* komunisme yang selalu dikaitkan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Oleh karena itulah, untuk meminimalisir dampak tersebut, Tionghoa “ditempatkan”

sebagai pada masyarakat yang cenderung pragmatis dan apolitis. Sebagai buktinya adalah masyarakat Tionghoa difokuskan hanya untuk mengurus bidang ekonomi dan perdagangan saja.

Makna etnis Tionghoa sebagai makhluk ekonomi ini sebenarnya merupakan bagian dari proses mitos politik yang diciptakan oleh para pihak yang berkepentingan, dan dalam beberapa periode, termasuk oleh negara di masa Orba, yang bertujuan mengeksklusi etnis ini ke dalam satu bidang tertentu. Eksklusi sosial tersebut bisa bermakna dua hal yakni alienasi dan juga domestifikasi. Model tersebut sebenarnya merupakan cara pemerintah untuk tetap menggunakan mekanisme stick and carrot untuk mengikat loyalitas sosial politik warga negaranya. Alienasi yang dialami etnis Tionghoa menjadikan mereka membatasi dengan sadar pergaulan dan komunikasi lintas budaya sehingga menjadikan etnis Tionghoa komunitas tertutup. Sedangkan pada pengertian yang kedua, etnis Tionghoa mengalami penjinakan oleh pemerintah agar tidak keluar dari konteks ekonomi yang telah diciptakan. Kedua labelisasi tersebut digunakan untuk pemerintah (atau rezim masa lalu) untuk melokalisir aktivitas dan ekspresi etnis Tionghoa agar bisa dipantau dan dijaga. Hal itu justru menciptakan adanya “mitos Cina” yang muncul secara tidak sengaja dalam ruang publik dengan menggambarkan bahwa “Cina” acapkali mengalami stereotif kurang baik.

Ketiga pandangan tersebut dalam kacamata politik negara ditempatkan secara ambigu. Di satu sisi, pemerintah “memelihara” mitos tersebut dengan menjadikan etnis Tionghoa dalam patronase negara sebagai motor ekonomi. Namun di sisi lainnya, pemerintah “membiarkan” mitos itu tumbuh dan berkembang sebagai bentuk “aksi cuci bersih” terhadap dampak kebijakan

yang berdampak pada publik. Pola perilaku negara tersebut sebenarnya mencerminkan kompleksitas negara sebagai ruang kosong yang menjadi ladang pertarungan kepentingan ekonomi-politik. Dalam konteks ini, negara digerakkan oleh kelompok oligarki yang berusaha mengamankan kepentingan ekonomi-politiknya.

Adanya sikap mendua tersebut tentu berakibat negatif terhadap eksistensi dan koeksistensi etnis Tionghoa pada kelompok masyarakat lainnya. Namun, etnis Tionghoa juga tidak bisa menolak terhadap politik negara yang diberlakukan karena sebenarnya juga ada kesadaran bahwa mereka adalah pendatang. Komunitas Tionghoa di Kota Surabaya berupaya untuk mensiasati hal tersebut dengan mendirikan usaha-usaha ekonomi yang pekerjaannya adalah penduduk sekitar, di mana secara tidak langsung akan mendorong komunikasi lintas kultural meski dalam kepentingan ekonomi. Setidaknya dengan strategi demikian, kelompok Tionghoa di Kota Surabaya mampu bertahan hingga saat ini di mana generasi terbaru tampaknya lebih bangga sebagai *Arek Suroboyo* ketimbang *Cino Suroboyo*, meskipun sikap macam ini dapat juga dibaca sebagai ironi. Namun demikian, baik komunitas etnis Jawa, Madura, dan Tionghoa masih memelihara sekat masing-masing sehingga kemudian memicu adanya akulturasi budaya satu sama lainnya. Baik etnis Jawa tidak mau diakui ke-Jawa-annya, sedangkan Madura masih berupaya membangun identitasnya, sedangkan Tionghoa berada dalam posisi dilema antara melepaskan identitasnya atau budayanya.

Dalam bidang ekonomi, beberapa konglomerasi besar Indonesia hadir dari tangan dingin etnis Tionghoa di Surabaya. Misalnya perusahaan Maspion dalam bidang elektronika dan manufaktur, maupun Sampoerna di bidang industri rokok. Selain konglomerasi ekonomi,

beberapa perkumpulan Tionghoa tumbuh subur misalnya INTI, PSMTI, PITI, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Surabaya menunjukkan profil sebagai salah satu tempat ekspresi yang “afirmatif” bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan etnis Tionghoa di Surabaya diwarnai oleh akulturasi secara alami dengan kelompok etnis lainnya melalui jalur perkawinan, perdagangan, maupun pendidikan. Ketiga jalur tersebut merupakan jalur klasik yang selama ini digunakan etnis Tionghoa untuk bisa berinteraksi dengan etnis lainnya. Hal itu dapat dilacak dari generasi keempat Tionghoa di Surabaya yang kini sebenarnya sudah agak “cair” identitasnya sebagai orang Tionghoa, dan justru menjadi “Jawa” atau “Arab”.

Kedua etnis tersebut menjadi preferensi penting bagi etnis Tionghoa untuk bisa berbaur dengan komunitas penduduk lainnya di Surabaya. Hal itulah yang menjadikan sebenarnya etnis Tionghoa di Surabaya paling dinamis dibandingkan dengan etnis Tionghoa lain yang tersebar di kota-kota Indonesia lainnya. Pada umumnya, etnis Tionghoa hanya menjadi manusia ekonomi (*economic workforce*) yang berpusat di kawasan perekonomian tertentu. Namun di Surabaya etnis Tionghoa dapat ditemui dalam berbagai ragam profesi. Tentunya kondisi tersebut terjadi lantaran posisi Surabaya yang notabene adalah kawasan pesisiran yang menjadi titik bertemunya berbagai macam identitas sehingga menampilkan sisi egaliter dan independent (Yee, 2011).

Implikasinya adalah secara historis mendesak warga kota untuk berkomunikasi satu sama lain terlepas dari identitas aslinya. Komunikasi antar ras tersebut berjalan lancar yang dijalankan melalui dialek *suroboyoan* yang mengedepankan sikap terbuka, apa adanya. Bagi etnis Tionghoa Surabaya, dialek tersebut cukup membantu mereka

membuka diri dengan etnis lainnya maupun dengan pemerintah. Oleh karena itu terkadang agak sulit untuk membedakan mana Tionghoa dan mana Jawa ketika di Surabaya karena keduanya memiliki kemiripan dalam bahasa dan *logat* lokal. Bukti dari pernyataan ini adalah kefasihan dalam berbahasa lokal tanpa harus tersekat pada latar belakang identitas aslinya.

Terkait dengan preferensi Arab dan Jawa sebagai model perkembangan etnis Tionghoa Surabaya, hal tersebut bisa ditelusuri melalui bahasa pengantar sehari-hari. Masyarakat Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia biasanya berbicara berdasarkan pada daerah asal misalnya Hakka, Hokkien, maupun Kanton. Namun bahasa tersebut melebur dengan dialek lokal yang menciptakan adanya bahasa campuran antara Indonesia, Jawa, maupun Mandarin. Adanya bahasa campuran dengan variasi dialek tersebut sebenarnya adalah bagian dari identifikasi diri melalui bahasa dominan seperti Jawa dan Madura. Kedua suku tersebut merepresentasikan diri sebagai mayoritas yang hendak diikuti oleh Tionghoa Surabaya agar diakui sebagai Arek Suroboyo. Beberapa bahasa Tionghoa kini sudah mulai tercampur dengan bahasa Jawa misalnya saja *koko cilik*, *koko gede*, *koko tengah*, dan lain sebagainya. Artinya secara prinsipil, interaksi itu berjalan tanpa ada intervensi negara melalui kebijakan asimilasinya. Identifikasi itu juga merupakan bagian dari strategi politis penerimaan minoritas di dalam masyarakat yang dominan.

Bagi Tionghoa di Surabaya, hal tersebut penting sebagai cara untuk menepis persepsi yang dianggap merupakan sikap eksklusif etnis Tionghoa di kalangan etnis lainnya. Meskipun di sisi lain eksklusivitas kelompok bukan hanya "trade mark" orang Tionghoa saja. "Eksklusivitas kelompok" yang dipersepsikan sebagai salah satu karakter

komunitas Tionghoa dianggap sebagai penghalang oleh sebagian kalangan etnis Tionghoa yang selama ini terjadi. Kondisi tersebut yang acap kali menciptakan adanya pandangan negatif bagi Tionghoa. Hal ini tercermin dalam ungkapan *singkek* yang bermakna peyoratif. Meskipun kini ungkapan tersebut secara perlahan mulai hilang, namun istilah stereotip tersebut sering kali terlontarkan secara spontan dalam nada meremehkan.

Namun demikian, kajian-kajian mengenai komunitas Tionghoa di Surabaya ini menunjukkan bahwa akulturasi berjalan secara natural, sehingga etnis Tionghoa pun merasa aman untuk tinggal di Surabaya. Hanya saja, kebijakan etnisitas yang dibangun setiap rezim itu berbeda pula. Kolektivitas komunal dapat dipahami sebagai ikatan berjejaring yang dimiliki oleh etnis Tionghoa Surabaya dalam menunjukkan pengaruhnya dalam masyarakat. Kolektivitas di antara kelompok-kelompok Tionghoa Surabaya dibangun atas dasar *klan* maupun juga organisasi (modern) yang menjadi intinya. Etnis Tionghoa di Surabaya melakukan adaptasi kultural yang bisa dimengerti sebagai bentuk upaya komunikasi lintas budaya maupun rasial dengan etnis non Tionghoa, yang dibangun dan dikembangkan melalui bahasa, pendidikan, maupun ekspresi budaya.

Dalam konteks Surabaya, posisi "putra daerah" tidak begitu disakralkan sehingga tidak memunculkan adanya kekuatan primordial yang hegemonik dan tunggal. Oleh karena itulah, relasi antara etnis dan ras yang berlangsung di Surabaya berjalan dinamis. Adanya sisi inklusivitas dalam memahami makna putra daerah sebenarnya juga sudah menjadi temuan menarik dalam melihat relasi mayoritas dengan minoritas. Hal ini mengingat di berbagai daerah Indonesia, sentimen putra daerah tersebut terkadang

menjadi komoditas politik, terlebih lagi menjelang pemilukada. Adanya sikap mengesampingkan makna putra daerah tersebut menunjukkan kalau penerimaan Tionghoa sendiri sudah seperti bagian dari komunitas orang asli.

Hal yang menarik dari Etnis Tionghoa Surabaya membangun pijakan ekonomi seraya membangun komunitasnya sendiri. Dengan demikian, meskipun relasi antar etnis berlangsung secara dinamis, namun secara sosial politik masih ada kecenderungan konflikual (Noordjanah, 2010). Sedangkan peran politik negara sendiri sebenarnya bersikap "mendua" karena berada dalam pertarungan antar etnis yang berlangsung di sana. Jawa secara klasik ditempatkan dalam posisi superior sedangkan Madura dan Tionghoa berada dalam posisi setelahnya (Devi, 2010).

Politik negara yang dibangun oleh Orde Baru lebih menekankan adanya praktik uniformisasi dengan melandaskan pada nilai, prinsip, dan norma Jawa. Pada dasarnya politik negara yang dilakukan Orde Baru adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan yang cenderung bertendensi kepada homogenitas daripada heterogenitas. Homogenitas tersebut lebih memudahkan adanya kontrol pusat terhadap daerah. Kondisi itulah yang kemudian berdampak pada pola relasi antar etnis Tionghoa Surabaya terhadap pemerintah lokal. Dalam literatur tentang sejarah etnis Tionghoa Surabaya digambarkan terjadi berbagai macam pola tarik ulur kepentingan antara etnis Tionghoa Surabaya dengan pemerintah lokal (hasil wawancara Oetomo, 2017). Ada saatnya hubungan antar entitas kelompok-kelompok etnis tersebut berlangsung secara harmonis, berganti lagi menjadi konflik, hingga yang mutakhir adalah kontradiksi atau konflik.

Adanya uniformisasi yang telah dibangun oleh pemerintah tersebut

pada dasarnya untuk melakukan penyeragaman terhadap semua warga negara. Idealnya hal itu dilakukan sebagai cara untuk mengurangi tensi mayoritas dengan minoritas. Namun demikian kebijakan ini juga mengundang hitam dan putih. Terkait dengan sisi gelap tersebut adalah minimnya ekspresi identitas asli dari kalangan Tionghoa karena sudah merasa menjadi bagian dari satu bangsa. Adapun terkait dengan sisi terangnya adalah, relasi mayoritas dan minoritas tidak terlalu muncul ke dalam narasi sosial. Kondisi inilah yang membuat Tionghoa mulai bisa terbuka diterima oleh masyarakat Surabaya.

Berbagai studi yang merangkum tentang masalah eksistensi Tionghoa Surabaya telah diulas dalam berbagai karya literatur ilmiah maupun populer. Dalam karya Andjarwati Noordjanah (2010) berjudul *Komunitas Tionghoa di Surabaya* mengulas banyak hal mengenai pergulatan Tionghoa Surabaya dari tahun 1910-1946. Dalam buku tersebut, etnis Tionghoa menjadi target dari pengaturan dari setiap kebijakan negara setiap rezimnya. Namun yang menarik adalah Tionghoa dicoba untuk keluar dari identitas aslinya dengan cara melakukan Jawanisasi. Adapun dalam kasus studi lain yang melihat studi Tionghoa melihat bahwa eksistensi budaya Tionghoa sekarang ini justru mengalami domestifikasi dan akulturasi budaya dengan budaya asli mereka di Tiongkok.

Hal tersebut dapat ditemui Yessica Loviana dan Ong Karsono (2013) yang berjudul *"Pandangan Etnis Tionghoa Surabaya terhadap Budaya Penggunaan Arak"* yang mengemukakan bahwa tradisi Arak dalam kalangan etnis Tionghoa Surabaya kini semakin dikurangi intensitasnya dalam perayaan keagamaan maupun juga selamatan (Yessica dan Ong, 2013). Etnis Tionghoa Surabaya kian dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Islam yang dominan di Surabaya yang menilai

bahwa arak adalah minuman alkohol yang dilarang oleh kedua entitas agama dan budaya tersebut. Oleh karena itulah penggunaan arak digantikan dengan minum teh yang masih bisa diterima oleh Jawa dan Islam. Melalui minum teh, etnis Tionghoa berusaha bernegosiasi secara kultural maupun politis untuk bagaimana dilihat sebagai orang Indonesia tanpa menanggalkan identitas ke-Tionghoa-annya. Temuan awal dalam studi ini menarik untuk dilanjuti, mengingat makanan acap kali menjadi faktor penting dalam melekatkan relasi mayoritas dengan minoritas di Indonesia. Dari situlah kemudian tercipta berbagai macam akulturasi.

Studi lain oleh Choirul Arif dan Budiawan (2013) yang berjudul "*Barongsai dan Identitas Muslim Tionghoa Surabaya*" melihat adanya pola negosiasi kultural yang dilakukan oleh Muslim Tionghoa Surabaya yang tergabung DPD PITI Surabaya maupun YMCH yang tetap berpegang pada prinsip "*Islam iya, Tionghoa juga iya*" untuk menegaskan bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya melupakan tradisi leluhur (Choirul, 2010). Selama ini atraksi barongsai dianggap sebagai pertunjukan sakral tradisi Konfusianisme untuk mengusir roh jahat. Namun ketika diterapkan dalam komunitas muslim Tionghoa malah justru pertunjukan barongsai beralih fungsi menjadi 1) sarana hiburan, 2) interaksi sosial, dan 3) representasi etnis. Kondisi tersebut sebenarnya tidak terlepas dari adanya realitas etnis maupun biologis bahwa Tionghoa Surabaya tidaklah bisa melepaskan relasi sejarah asal-usul maupun pertalian leluhur. Oleh karena itulah, barongsai kemudian mengalami komodifikasi budaya agar bisa menjadi instrumen yang menyeimbangkan antara *aqidah* dan budaya leluhur. Komodifikasinya seperti halnya lebih mengedepankan dakwah. Tentunya menjadi muslim bagi etnis Tionghoa akan dianggap dua hal yakni 1)

berseberangan dengan pandangan publik bahwa Tionghoa biasanya beragama non muslim, 2) terselamatkan, karena pada akhirnya etnis Tionghoa kemudian akhirnya memilih Islam sebagai jalan keluar.

Studi yang mengaitkan dimensi politik dengan etnis Tionghoa ditulis oleh Warsono dan Yusfiriana yang berjudul "*Orientasi Politik Tionghoa Surabaya dalam Pemilu 2009 dan Pemilu 2014*". Temuan dalam studi ini menarik karena mencermati partisipasi politik etnis Tionghoa Surabaya dalam panggung formal yang didasarkan pada 1) alasan sejarah, 2) keinginan menghapus perda diskriminatif, 3) menjadikan Surabaya lebih baik. Adapun untuk alasan pertama ada keinginan kuat Tionghoa Surabaya untuk mengubah politik lokal karena didasarkan pada dua hal yakni sejarah diskriminatif Orde Baru dan juga peran organisasi yang menaungi mereka selama ini. Adapun keinginan mengubah perda diskriminatif tersebut terkait dengan proses legalisasi kewarganegaraan yang berbelit-belit sehingga menjadikan pelayanan publik bagi warga keturunan dipersulit. Sedangkan keinginan mengubah Surabaya untuk lebih baik tidak terlepas dari upaya etnis Tionghoa Surabaya untuk tetap mempertahankan peran dan posisi di bidang ekonomi melalui perubahan regulasi daripada melalui kekuasaan politik.

Salah satu bentuk dari warisan politik negara di masa lalu khususnya era ORBA adalah pelarangan segala macam ekspresi budaya Tionghoa, salah satunya pergantian nama Tionghoa menjadi Indonesia. Hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Temuan Sugiri (2003) cukup menarik dalam mengkerangkai sikap Tionghoa Surabaya terkait soal pergantian nama tersebut. Menurut Sugiri, yang menjadi

landasan orang Tionghoa untuk berganti nama karena tekanan pemerintah dan juga tekanan sosial. Namun demikian, masalah pergantian nama itu juga tidak bisa sembarangan karena pada umumnya mengikuti pola aturan seperti halnya 1) nama umum Indonesia, 2) nama raja, 3) nama keyaknian, dan lain sebagainya (Sugiri, 2003). Dengan kata lain, pergantian nama tersebut merupakan ekspresi dari adanya patronase sekaligus pula intimidasi politik yang didapatkan oleh Tionghoa Surabaya. Intimidasi yang paling sering diterima adalah pelayanan barang publik yang tidak seimbang antara Tionghoa maupun non-Tionghoa.

Integrasi Tionghoa sebagai Umat Minoritas ke dalam Masyarakat Mayoritas

Permasalahan integrasi dalam konteks ini sebenarnya bukan berarti “melebur” secara sepenuhnya, namun lebih pada penyatuan mayoritas dan minoritas menjadi satu entitas yang baru. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, adanya keengganan untuk melepaskan identitas ketionghoan, aspek bahasa, maupun juga aspek makanan menjadi kunci penting dalam membahas integrasi Tionghoa ke dalam masyarakat Surabaya itu sendiri. Adapun persoalan terbesar dalam memahami makna integrasi itu adalah bagaimana kita kemudian memaknai Tionghoa ini dalam bentuk warga negara. Hal ini dikarenakan status dan posisi warga negara itu nantinya yang akan berdampak persepsi orang lokal terhadap warga Tionghoa itu sendiri.

Pertanyaan besar “menjadi Surabaya atau Cino” masih menggelayuti bagi etnis Tionghoa hingga hari ini. Keduanya sebenarnya telah menyatu dalam identitas Tionghoa generasi sekarang ini. Namun demikian dalam membicarakan etnis Tionghoa di Surabaya sebenarnya bukanlah entitas

tunggal, namun terfragmentasi satu sama lain. Dalam hal ini terdapat dua arus besar dalam memahami etnis Tionghoa terdapat dua kelompok besar, yakni (a) Tionghoa-kapitalistik (eksklusif dan “mengamankan” peran sosial mereka sebagai bagian dari sejarah pembentukan identitas yang panjang di Surabaya;) dan b). Tionghoa-kebudayaan (cara bergaulnya lebih mudah, kita banyak temukan di pasar-pasar) (hasil wawancara Susan, 2017). Adanya perbedaan tersebut sebenarnya menunjukkan adanya perbedaan latar belakang bagi kalangan Tionghoa itu sendiri.

Kelompok Tionghoa dalam golongan yang pertama merupakan kelompok elite yang hingga kini memiliki hubungan spesial dengan pemerintah daerah karena jaringan bisnis maupun jaringan aktivitas sosial. Hal itulah yang menyebabkan kelompok Tionghoa yang pertama ini bisa menjadi kelompok kepentingan *vis a vis* pemerintah daerah. Meskipun dalam panggung politik formal peran mereka tidak begitu menonjol, namun dalam panggung politik informal, mereka memegang kunci karena mempunyai akses untuk “menekan” pemerintah. Salah satu aktor Tionghoa Surabaya yang melakukan peran ini adalah Singky Soewadji yang berprofesi sebagai pengusaha kembang api namun memiliki jaringan politik cukup kuat dengan para pembesar Jawa Timur melalui aktivitas sosialnya sebagai Ketua Persatuan Berkuda Jawa Timur dan Pengelola Kebun Binatang Surabaya. Sosok Singky ini menarik karena sebelumnya dia adalah korban diskriminasi yang dilakukan oleh negara semasa Orde Baru, maupun juga framing media yang menyudutkan etnis Tionghoa yang dilakukan media massa. Namun kemudian perlahan dengan kekuatan patronase bisnisnya, sosok Singky ini menurutnya perlahan mampu menjadi “orang kuat” Surabaya (hasil wawancara Soewadji, 2017).

Sosok Singky Soewadji bukanlah tanpa sebab karena menurutnya, bakatnya dalam mengelola e Kebun Binatang Surabaya (KBS) membuat Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) sempat mengundangnya sebagai mitra diskusi pemerintah. Bagi Singky, KBS adalah kunci politiknya dalam mempengaruhi elite politik Jawa Timur sehingga bisa mengklaim diri sebagai “Gubernur Jendral Jawa Timur”. Dari mulai Saifullah Yusuf, Khofifah Parawansa, Dahlan Iskan, dan lain sebagainya mengenal sosok Singky sebagai orang penting di balik layar Jawa Timur. Singky sendiri adalah potret keberhasilan informal Tionghoa Surabaya yang kini berperan besar sebagai patron ekonomi-politik Jawa Timur. Poin penting yang ingin disampaikan di sini adalah peran pengaruh etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi ternyata juga bisa berpengaruh dalam bidang politik meski secara informal.

Senada dengan Singky, tokoh elite Surabaya lainnya adalah Totok Lusida yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Real Estate Indonesia (REI) pada tahun 2016-2019. Berbeda dengan Singky yang menguasai jalur politik informal dan mampu memainkan perannya sebagai pemain politik di balik layar, sosok Totok sendiri cenderung membatasi diri dari kekuasaan dan berfokus sebagai mitra pemerintah dalam hal pembangunan permukiman.

“Saya di REI hanya fokus untuk membantu program pemerintah semisal pembangunan permukiman layak bagi masyarakat. Waktu saya 4 hari di Jakarta dan 3 hari di Surabaya. Paska ribut-ribut Pilkada Jakarta kemarin, saya tidak ingin kejadian rusuh Mei 1998 terulang di Surabaya.” (Hasil wawancara Lusida, Juni 2017)

Apa yang dikemukakan oleh Totok sendiri mewakili sikap “sensor diri” yang digunakan etnis Tionghoa untuk

tetap membatasi diri dari pergaulan politik, namun masih berperan aktif dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pengambilan kebijakan. Adapun kedua tokoh Tionghoa Surabaya tersebut adalah mewakili kelompok aktor pengusaha Tionghoa Surabaya yang bisa menjadi “orang kuat” lokal sesuai kapasitas masing-masing. Bagi kelompok pertama ini, masalah politik itu menyoal pada redistribusi uang kepada individu dan kelompok tertentu karena bagi mereka, kepentingan bisnis itu lebih politis daripada kepentingan kekuasaan. Kelompok Budaya ini kemudian salah satunya diwakili oleh Perpustakaan Medayu Agung dengan tokohnya bernama Oei Him Wie sebagai tokoh sentral. Bagi kalangan Tionghoa Surabaya, keberadaan perpustakaan ini adalah bentuk memori hidup yang menyimpan banyak kisah mengenai dinamika Tionghoa di sana.

Karakteristik kelompok pertama yang pasif-politis menandakan bahwa mereka sebenarnya sudah melek politik secara informal. Mereka hanya ingin tetap berupaya menjadi patron atas bisnis mereka seraya melihat secara politis terhadap negara melalui aktivitas sosialnya. Mereka dalam kelompok pertama ini bukanlah kelompok pemikir, namun dapat dikatakan sebagai kelompok “oligarkis semu” dalam konteks politik lokal. Identitas ke-Tionghoa-an dipakai secara politis sebagai “kartu truf” terhadap politik negara dengan menampilkan diri bahwa komunitas pengusaha Tionghoa selalu memberikan PAD terbesar bagi pemerintah lokal baik di tingkat provinsi maupun daerah kabupaten/ kota.

Sedangkan narasi lain disampaikan oleh etnis Tionghoa dari “Kelompok Tionghoa-kebudayaan” yang lebih suka membangun wacana-wacana sosial lewat pendekatan atau bergaul dengan masyarakat sekitar, seperti dalam bentuk organisasi-organisasi PSMTI yang

memfokuskan pada kegiatan kebudayaan, atau INTI di isu-isu kebangsaan, maupun PITI yang bergiat di ranah budaya Islam-Tionghoa. Masing-masing organisasi lokal Tionghoa Surabaya ini punya pemimpin sendiri, tapi basisnya tokoh-tokoh pengusaha. Hal ini memunculkan anggapan bahwa tujuan dari organisasi kurang jelas (Lusida, 2017). Menurut narasumber, ketidakjelasan tujuan organisasi tersebut disebabkan belum ada rumusan tunggal tentang visi-misi dari organisasi Tionghoa Surabaya, tentang apa yang harus dilakukan. Namun, dalam pengamatan kami, bisa jadi tokoh-tokoh pengusaha memang diperlukan dan mereka ada untuk mendukung kapasitas organisasi. Pun dapat diartikan bahwa ikatan ketionghoa-an sesungguhnya tidak pudar karena berbeda kelas atau identitas. Contohnya dapat dilihat dari ukiran nama-nama penyumbang pada dinding pualam yang dipajang di sisi kiri bagian depan mesjid Cheng Ho Surabaya, jelas tertera nama-nama yang mencirikan ada dari kalangan etnis Tionghoa baik yang Islam, non muslim, atau bahkan non Tionghoa, yang dicantumkan sebagai donatur pembangunan mesjid itu. Hal yang sama ditemui pada ukiran nama-nama donatur di dinding bagian dalam kelenteng Toapekong Fuk Tet Che di Semabung, Bangka. Kelenteng bersejarah yang umurnya 200 tahun ini terbakar tahun 2015 dan memerlukan waktu 20 bulan untuk membangunnya kembali. Pendanaannya diperoleh dari para donatur baik yang beretnis China, dari komunitas China diaspora maupun dari warga atau tokoh lokal yang beragama Islam di seputar Babel, ada pula donatur yang beragama Kristen dan lainnya. Pembukaan kembali di awal 2017 dihadiri oleh berbagai lapisan warga di Bangka.

“Saya terlahir sebagai Tionghoa, namun sering disangka sebagai Jawa. Namun begitu di UNAIR ketahuan saya Tionghoa. Maka segala atribut

sebagai dosen lantas direduksi karena dianggap akan membangkitkan sentimen minoritas” (hasil wawancara Oetomo, Juni 2017).

Sosok Dede Oetomo sendiri, yang dikenal sebagai tokoh pluralisme dan *civil rights*, adalah potret Tionghoa Surabaya yang peduli dengan masalah advokasi hak-hak dasar yang berfokus pada masalah kewarganegaraan dan pelayanan publik bagi warga keturunan dan minoritas. Baginya, diskriminasi etnis malah justru akan mengorbankan api kebencian yang tidak akan lepas dari relasi warga negara. Sementara, terkait dengan sentimen kebencian tersebut, jutaan lembar arsip-arsip sejarah Tionghoa yang dikelola dengan telaten oleh sosok Oei Him Wie --yang pernah menjadi pengarsip pidato-pidato BK-- dengan sejumlah kecil staf melalui Perpustakaan Medayu Agung adalah contoh bagaimana orang Tionghoa berkontribusi pada upaya pendokumentasian eksistensi Tionghoa Surabaya dari masa lampau hingga kini. Menurutnya, masalah Tionghoa atau non Tionghoa / non pribumi atau pribumi bukanlah persoalan penting, namun poinnya adalah mencegah agar sejarah kebencian identitas yang disulut melalui isu-isu sentimen Tionghoa dan non Tionghoa terjadi lagi. Oleh karena itulah, baik Dede dan Oei dapat disebut sebagai gambaran kelompok kedua Tionghoa Surabaya yang bersikap “pasif-akomodatif” terhadap kekuasaan negara, dan lebih bergerak bersama masyarakat yang juga berfungsi sebagai “jalur penerimaan” terhadap eksistensi dan peran mereka.

SIMPULAN

Hal yang bisa disimpulkan dalam studi ini adalah relasi Tionghoa sebagai umat minoritas dengan masyarakat Surabaya sebagai mayoritas itu berjalan dinamis dan harmonis. Studi ini

tentu sekiranya berlawanan dengan temuan studi-studi serupa yang masih memperlihatkan adanya temuan politik identitas yang masih kuat, muslim-non muslim, maupun juga ekspresi rasialisme. Temuan kasus mayoritas dan minoritas Surabaya ini menunjukkan kalau sebenarnya Tionghoa bukanlah etnis minoritas yang eksklusif.

Adanya integrasi lewat jalur bahasa dan budaya memungkinkan umat minoritas Tionghoa di Surabaya ini diterima secara meluas. Implikasi yang ditimbulkan dari situ adalah eksistensi lama warga Tionghoa yang ada di Surabaya. Hal inilah yang membuat Tionghoa ini bukan lagi dimaknai sebagai umat pendatang, melainkan sudah dimaknai sebagai orang asli. Kondisi inilah yang menjadikan batas antara minoritas maupun mayoritas menjadi kabur sama sekali di Surabaya.

Meskipun dalam berbagai peristiwa, ada semacam pengaruh tidak langsung antara peristiwa nasional dengan eksistensi Tionghoa di Surabaya. Namun secara garis besar, hal itu bisa ditanggulangi dengan cara membangun kohesivitas antar umat beragama di sana sehingga terciptalah suatu harmoni.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengapresiasi secara penuh kerjasama dan kekompakan anggota tim yakni Irine Hiraswari Gayatri, Alfitra Salamm, Asvi Warman Adam, Fathimah Fildzah Izzati, maupun juga Adiyatnika selama proses terjun di lapangan untuk mencari data. Ucapan juga ditujukan kepada redaksi jurnal Harmoni Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan para reviewer atas terbitnya artikel ini.

DAFTAR ACUAN

- Arif, C., Simatupang, L, Budiawan.(2010). *Barongsai dan Identitas Muslim Surabaya*. Paper presented at The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization.
- Basundoro, Purnawan. (2013). *Merebut ruang kota: aksi rakyat miskin kota Surabaya, 1900-1960an*. Jakarta: Marjin Kiri.
- BPS.(2010) *Kewarganegaraan, suku bangsa, agama, dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia*. Jakarta : BPS Press.
- Devi, Shinta. (2010).*Etnis Tionghoa dalam sejarah pendidikan masyarakat kota Surabaya*. Yogyakarta : Penerbit Lilin.
- Effendi, W., & Prasetyadji. (2008). *Tionghoa dalam cengkraman SKBRI*. Jakarta: VisiMedia.
- L, Yessica, G., & Ong, K. (2013). Pandangan Etnis Tionghoa Terhadap Budaya Penggunaan Arak. *Century*, 1, 1-15

- Noordjanah, Andjarwati. (2010). *Potret komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Soewarsono, (2000). *Surabaya : kota, penduduk, & hubungan antar kelompok*. In PMB (Ed.), *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PMB Press.
- Sugiri, E. (2003). Perspektif Budaya Perubahan Nama Diri Bagi WNI Keturunan Tionghoa Surabaya. *Bahasa & Seni*, 31, 66-67.
- Tan, Melly G. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia: kumpulan tulisan*. Jakarta: Yayasan Obor
- Tanasaldy, T. (2007). *Politik identitas etnis di Kalimantan Barat*. In K.v.Gerry (Ed.). Jakarta: Obor.
- Tirtosudarmo, R. (2007). *Mencari Indonesia: demografi politik pasca Soeharto*. Jakarta: LIPI Press.
- Yee, Herbert (Ed.). (2011), *China's rise - threat or opportunity?*. London : Routledge.

Daftar informan:

- Lusida, Totok, (2017, April 23). Personal Interview.
- Oetomo, Dede. (2017, April 18-20). Personal interview.
- Prayogo, Hendy (2017, April 21). Personal Interview.
- Soewadji, Singky, (2017, April 18). Personal Interview.
- Susan, Novri, (2017, April 21). Personal interview.